



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9789-9803

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Otonomi, Solidaritas, dan Strategi Ekonomi: Praktik Kerja Pemulung TPA Tamangapa, Makassar

Maulana Ishak¹, Muh. Iqbal Latief², M. Ramli AT³

¹Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

^{2,3}Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

¹maulanaishk13@gmail.com, ²iqballatief@unhas.ac.id, ³mramliat@unhas.ac.id

Abstrak

Pemulung merupakan aktor penting dalam sistem daur ulang perkotaan, namun praktik kerja mereka masih sering dipahami hanya dari perspektif kerentanan ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana otonomi, solidaritas, dan strategi ekonomi membentuk praktik kerja pemulung di TPA Tamangapa, Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus instrumental. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan, observasi partisipan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulung memiliki otonomi dalam menentukan waktu dan lokasi kerja tanpa intervensi formal, serta membangun solidaritas melalui bantuan fisik, berbagi informasi, berbagi sumber daya, dan pemanfaatan gubuk sebagai ruang kolektif. Pengetahuan mengenai jenis, nilai, dan rantai pasok material daur ulang menjadi dasar penyusunan strategi jual-simpan dalam menghadapi fluktuasi harga. Sistem panjar dan nota berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekonomi ketika kebutuhan mendesak muncul, namun pada saat yang sama menciptakan ketergantungan terhadap pengepul. Diversifikasi nafkah juga dilakukan sebagai strategi bertahan ketika pendapatan dari pemulung tidak mencukupi. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kerja pemulung tidak hanya didasarkan pada rasionalitas ekonomi, tetapi juga pada relasi sosial, produksi ruang, dan ekonomi moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otonomi dan solidaritas menjadi sumber ketahanan pemulung, meskipun tetap dibatasi oleh ketergantungan struktural dalam rantai ekonomi informal.

Kata kunci: Pemulung, Praktik Kerja, Otonomi, Solidaritas, Ekonomi Informal, TPA Tamangapa

1. Latar Belakang

Volume sampah global telah mencapai 2,56 miliar ton pada 2022 dan diproyeksikan bertambah menjadi 3,86 miliar ton pada 2050 (Cook et al., 2026). Di negara-negara berkembang, pemulung menjadi tulang punggung daur ulang informal. Mereka mengumpulkan, memilah, dan menjual material bernilai seperti plastik, logam, kertas, dan kardus yang seharusnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Kontribusi mereka terhadap ekonomi sirkular perkotaan sangat signifikan, namun ironisnya, pemulung sering terpinggirkan dalam kebijakan formal dan sulit mendapatkan pengakuan atas peran strategis mereka (Colombijn, 2020). Di berbagai kota, kontribusi ini paling terlihat di tempat pemrosesan akhir (TPA), tempat di mana material bernilai bertemu dengan kerja keras mereka setiap hari. Salah satu lokasi di mana peran dan dinamika kerja pemulung dapat diamati secara mendalam adalah TPA Tamangapa, Makassar.

TPA Tamangapa, yang juga dikenal sebagai TPA Antang, merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir resmi di Kota Makassar. Secara formal, kawasan ini ditetapkan sebagai zona infrastruktur tertutup untuk pengelolaan sampah. Namun, di dalamnya, sekitar 200 kepala keluarga pemulung justru tinggal dan menggantungkan hidup. Mayoritas dari mereka adalah migran yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Mereka membangun gubuk dari seng bekas yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan kerja sehari-hari. Aktivitas mereka meliputi pemilahan, pengumpulan, dan penjualan material bernilai ekonomi seperti plastik, karton, besi tua, dan barang elektronik (Rusni, 2024). Kehidupan mereka tidak semata-mata kisah kepasrahan; ada strategi, otonomi, dan solidaritas yang terbangun secara kolektif.

Pekerjaan pemulung di berbagai konteks Global South memperlihatkan sebuah paradoks yang menarik untuk dicermati. Di satu sisi, mereka bekerja dalam kondisi yang rentan: pendapatan tidak menentu, risiko kesehatan, dan stigma sosial yang melekat. Studi lintas negara menunjukkan bahwa pendapatan pemulung seringkali berada

di bawah upah minimum, sementara akses terhadap perlindungan sosial nyaris tidak tersedia (Amin et al., 2026; Sasaki et al., 2022). Di sisi lain, literatur juga mendokumentasikan bahwa pemulung memiliki kemampuan untuk mengorganisasi kerja secara mandiri, membangun solidaritas, dan mengembangkan strategi ekonomi adaptif (Akponah, 2018; Dias, 2016; Samson, 2010; Wittmer, 2021). Mereka bukan sekadar korban struktur; mereka adalah aktor yang secara aktif merespons ketidakpastian penghidupan. Ironisnya, kemampuan adaptif ini seringkali luput dari perhatian kebijakan formal yang cenderung melihat pemulung semata sebagai kelompok rentan yang perlu diselamatkan atau diformalisasi (Dias, 2016). Kompleksitas praktik kerja yang simultan antara kerentanan dan kemampuan beradaptasi ini belum banyak mendapat perhatian dalam literatur yang ada, khususnya dalam konteks TPA Indonesia Timur.

Situasi paradoks antara kerentanan dan kemampuan beradaptasi ini berakar pada beberapa tantangan struktural yang dihadapi pemulung di Indonesia. Mereka mengalami stigmatisasi sosial (Fort, 2026), marginalisasi ekonomi dengan pendapatan di bawah upah minimum (Amin et al., 2026; Sasaki et al., 2022), serta pola nafkah ganda berkeahlian rendah yang melanggengkan kerentanan (Angriani et al., 2024, 2023). Studi tentang ketahanan pemulung (Akponah, 2018; Dias, 2016; Samson, 2010) menunjukkan pentingnya modal sosial, pengetahuan tubuh, dan strategi ritme kerja.

Namun, studi-studi yang ada masih terfragmentasi. Kutub pertama berfokus pada aspek ekonomi makro: Sasaki et al. (2022) pada pendapatan dan upah minimum, Amin et al. (2026) pada kerentanan struktural dan *asymmetric inclusion*, serta Colombijn (2020) pada rantai pasok daur ulang dari perspektif pabrik. Kutub kedua menyoroti organisasi kolektif dan inovasi *grassroots*: Kain et al. (2022) dan (Campos et al., 2023) menganalisis koperasi, serikat, serta jaringan pemulung di Amerika Latin dan Afrika Timur. Kelompok ketiga mendalami dimensi subjektif dan spasial: Wittmer (2021) pada *wellbeing* dan otonomi relasional perempuan pemulung di India, Xheneti and Madden (2025) pada utang moral dan ruang representasional, Lata (2022) pada produksi *counter-space* melalui *quiet encroachment*, Akponah (2018) pada pengetahuan material *embodied* dan ritme kerja di Lagos, serta Fort (2026) pada ekonomi moral dan utang sebagai kontrol akses di TPA Sumbawa. Masing-masing kelompok hanya menyoroti satu atau dua dimensi secara terpisah.

Pemahaman yang utuh tentang praktik kerja pemulung di TPA memerlukan integrasi beberapa dimensi yang selama ini terfragmentasi. Studi ini mengidentifikasi empat kekurangan dalam literatur yang ada. Pertama, integrasi simultan antara dimensi otonomi kerja, solidaritas, ruang kolektif, pengetahuan material, strategi jual-simpan, sistem utang informal (panjar dan nota), serta diversifikasi nafkah dalam satu kerangka analisis masih jarang dilakukan. Kedua, studi tentang pemulung di TPA Tamangapa dalam kerangka *spatial practice* dan *representational space* (Lefebvre) masih langka, karena sebagian penelitian sebelumnya hanya berfokus pada modal sosial atau diversifikasi nafkah secara deskriptif (Angriani et al., 2024, 2023). Ketiga, mekanisme rinci sistem utang panjar dan nota belum didokumentasikan secara sistematis. Keempat, strategi jual-simpan (menahan stok untuk merespon fluktuasi harga) serta negosiasi harga harian dengan pengepul belum dianalisis sebagai praktik ekonomi mikro yang membentuk penghidupan pemulung. Studi Akponah (2018) tentang ritme kerja dan pengetahuan material *embodied*, serta Lata (2022) tentang *counter-space* dan *quiet appropriation*, paling mendekati, namun fokusnya terbatas pada pengalaman sensorik dan ruang publik perkotaan, tanpa menjangkau karakteristik spesifik TPA seperti pergerakan antar zona dengan tingkat risiko berbeda, gubuk yang dipindah mengikuti zona bongkar, serta relasi kuasa dengan pengepul yang mengakses langsung ke TPA. Studi ini diposisikan untuk mengisi keempat kekurangan tersebut secara simultan melalui studi kasus pada pemulung di TPA Tamangapa, dengan mengintegrasikan analisis otonomi, solidaritas, ruang kerja, pengetahuan material, strategi jual-simpan, sistem panjar dan nota, serta diversifikasi nafkah dalam satu kerangka yang menghubungkan dimensi spasial (Lefebvre), *embeddedness* (Polanyi), dan ekonomi moral (Thompson).

Studi ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana praktik kerja pemulung di TPA Tamangapa terorganisasi secara kolektif dan adaptif dalam menghadapi ketidakpastian penghidupan. Secara spesifik, studi ini menganalisis bagaimana otonomi waktu dan lokasi kerja, solidaritas, serta pemanfaatan gubuk sebagai ruang koordinasi bersama membentuk produksi ruang kerja kolektif. Selain itu, studi ini mengeksplorasi bagaimana pengetahuan material digunakan untuk menyusun strategi jual-simpan, bagaimana sistem panjar dan nota membentuk hubungan ekonomi yang melindungi sekaligus membelenggu, serta bagaimana diversifikasi nafkah menjadi strategi bertahan. Studi ini juga mengidentifikasi kondisi di mana praktik kerja tersebut menjadi sumber otonomi dan solidaritas sekaligus berpotensi menjadi jeratan struktural akibat ketergantungan pada pengepul dan fluktuasi harga.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus instrumental (Stake, 1995), dipilih untuk memahami secara mendalam praktik kerja pemulung di TPA Tamangapa. Penelitian berlokasi di TPA Tamangapa, Kota Makassar, Indonesia. Pengumpulan data berlangsung pada Februari hingga Maret 2026.

Pemilihan partisipan menggunakan purposive sampling (Creswell, 2023). Kriteria untuk pemulung: telah bekerja minimal lima tahun di TPA Tamangapa, berusia antara 25 hingga 60 tahun dan memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik kerja. Proses dimulai dari pendamping komunitas (YAPTA-U) dan pejabat UPTD TPA Tamangapa sebagai *gatekeeper*. Jumlah partisipan adalah tujuh orang. Seluruh nama disamarkan dengan inisial.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Kode	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	AS	47 tahun	Perempuan	Pemulung sejak tahun 1999
2.	MW	39 tahun	Perempuan	Pemulung sejak tahun 2000
3.	SR	43 tahun	Perempuan	Pemulung sejak tahun 2010
4.	IW	28 tahun	Laki-laki	Pemulung sejak tahun 2020
5.	AI	26 tahun	Laki-laki	Pemulung sejak tahun 2020
6.	BA	34 tahun	Laki-laki	Pengepul
7.	NS	45 tahun	Laki-laki	Pejabat UPTD TPA Tamangapa

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi. Wawancara berlangsung 30–120 menit, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Makassar sesuai preferensi partisipan, direkam dengan izin, ditranskrip verbatim, dan transkrip dikembalikan kepada partisipan untuk verifikasi (*member check*) (Kvale and Brinkmann, 2009). Sebelum wawancara, peneliti membangun rapport dengan mengunjungi Sanggar Kegiatan Warga (SKW) di sekitar TPA. Observasi partisipan dilakukan 3–5 kali per minggu selama periode penelitian, berfokus pada praktik kerja otonom, solidaritas, penggunaan gubuk, interaksi dengan pengepul dan sopir truk, serta strategi jual-simpan. Dokumentasi foto meliputi kondisi TPA, gubuk, dan aktivitas memulung.

Peneliti utama adalah akademisi sosiologi dari luar komunitas. Untuk mengurangi bias, peneliti membangun rapport secara intensif, melibatkan *gatekeeper* dalam validasi data, dan menulis catatan reflektif (Lincoln and Guba, 1985). Refleksi posisionalitas dilakukan mengingat perbedaan gender, etnis, dan kelas antara peneliti dan sebagian informan.

Analisis data mengikuti strategi Stake (1995): dimulai dari transkrip, kode deskriptif, agregasi kategoris, dan pengembangan tema. Pengorganisasian data dibantu dengan perangkat lunak ATLAS.ti versi 25. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemulung, pengepul, dan pejabat UPTD) dan triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi). *Member check* dilakukan dengan mengembalikan ringkasan temuan kepada pemulung dan pendamping komunitas. *Audit trail* disediakan dalam bentuk catatan lapangan, jejak analisis ATLAS.ti, dan catatan reflektif. Studi ini memenuhi etika dengan *informed consent* lisan (karena keterbatasan literasi sebagian informan), anonimitas (penggunaan inisial), persetujuan foto, dan pengembalian hasil penelitian ke komunitas melalui YAPTA-U

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil

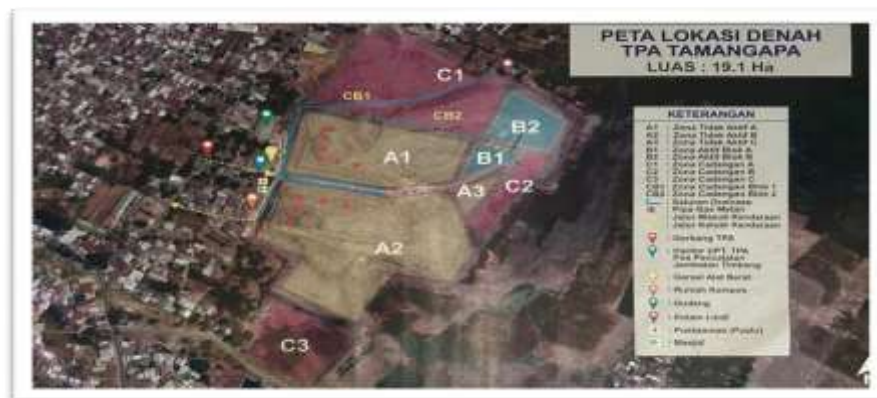
Studi ini mengungkap bagaimana praktik kerja pemulung di TPA Tamangapa terorganisasi secara kolektif dan adaptif dalam ketidakpastian penghidupan. Pertama, pemulung memiliki otonomi penuh dalam menentukan waktu dan lokasi kerja, didukung oleh solidaritas yang terwujud dalam bantuan fisik, berbagi sumber daya, serta pemanfaatan gubuk sebagai ruang koordinasi bersama. Kedua, pemulung mengandalkan pengetahuan rinci tentang jenis dan nilai material untuk menyusun strategi jual-simpan, sekaligus terikat dalam sistem utang (panjar dan nota)

yang melindungi namun juga membelenggu; diversifikasi nafkah menjadi strategi bertahan ketika pendapatan dari memulung tidak mencukupi.

3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. TPA ini mulai beroperasi pada tahun 1993 dan hingga saat ini menerima volume sampah harian mencapai 800–900 ton. Akumulasi sampah yang terus bertambah telah membentuk tumpukan setinggi sekitar 20 meter, melampaui kapasitas desain awal. Metode pengelolaan yang digunakan masih berupa *semi-open dumping*, yang berdampak pada seringnya terjadi kebakaran akibat gas metana serta rembesan lindi ke air tanah. TPA Tamangapa memiliki dua zona pembongkaran utama. Zona Bintang Lima menggunakan mekanisme pembongkaran cepat dengan alat berat, sementara Zona Tangkasa mengandalkan pembongkaran manual dari truk box, yang mengakibatkan antrean lebih panjang dan waktu tunggu lebih lama. Aktivitas di TPA berlangsung tanpa jeda 24 jam sehari.

Di tengah kondisi tersebut, sekitar 200 kepala keluarga pemulung menggantungkan penghidupan pada material yang dapat dikembalikan ke sirkulasi ekonomi, seperti plastik, karton, besi tua, dan barang elektronik. Gubuk-gubuk dari seng bekas berjajar di sekitar zona kerja, berfungsi sebagai tempat istirahat, menyimpan hasil sortiran, dan bercengkerama. Mayoritas pemulung merupakan migran dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang telah bertahan di ruang ini selama tiga dekade.



Gambar 3.1 Peta Denah Lokasi TPA Tamangapa (Sumber: UPTD TPA Tamangapa, 2026)

3.1.2 Praktik Kerja Otonom, Jaringan Solidaritas, dan Ruang Kolektif

Pemulung di TPA Tamangapa tidak terikat pada aturan formal. Mereka mengatur sendiri waktu dan tempat bekerja tanpa intervensi dari pihak manajemen TPA maupun pemerintah. Seorang pemulung yang telah bekerja sejak 1999 menyatakan:

“Tidak adaji, kitaji aturki sendiri, mau-mauta ji. Tidak adaji juga aturki itu lokasia, kitaji. Kalau mauki di Bintang Lima, ikut di tongkangki itu namanya, kalau di atas iya Tangkasa. Iya bebasji orang tidak adaji aturan..” (AS, 1 Maret 2026)



Gambar 2. Lokasi Zona Tangkasa dan Zona Bintang Lima (Tongkang) (Sumber: Google Earth diolah oleh Peneliti, 2026)

Kebebasan ini diakui oleh pejabat UPTD yang secara formal bertanggung jawab atas pengelolaan TPA:

“Saya tidak tahu siapa yang bikin peraturan begitu, mungkin sesama mereka. Mereka sendiri yang baku atur, karena ranah saya kan tidak disitu..” (NS, 18 Februari 2026)

Pemulung memiliki kebebasan penuh untuk berpindah antar zona pembongkaran, baik kawasan Bintang Lima (mekanis) maupun Tangkasa (manual). Seorang pemulung menegaskan:

“Mau-mautaji, mau di bintang lima, mau di tangkasa, tidak adaji masalah. Kayak suamiku tadi malam, di tongkangi dulu, mungkin karena sedikit nadapat, akhirnya naikki di tangkasa, pas sampai di tangkasa 2 karungji juga nadapat, samaji.” (MW, 9 Maret 2026)

Preferensi lokasi bersifat individual dan rasional. Ada yang memilih Bintang Lima karena merasa lebih enak, ada yang memilih Tangkasa karena merasa lebih aman:

“Kalau saya ditongkang. Karena lama mka ditongkang, lebih enak ku rasa ditongkang.”(MW, 9 Maret 2026)

“Di sana saya nak, *malla-mallaka* (ketakutan) di situ. Kalau disini tidak terlalu bahaya.” (SR, 10 Maret 2026)

Pengaturan waktu kerja sepenuhnya diserahkan kepada individu, tanpa jadwal tetap. Seorang pemulung laki-laki mengonfirmasi:

“Iye kitaji sendiri aturki, yang *payabo* yang kerja terserahji iya, tapi yang pasti itu bedai *payabo* siang sama *payabo* malam.” (IW, 11 Maret 2026)

Shift berlangsung secara bergiliran dan sukarela, tanpa paksaan atau kontrak. Pemulung lain merinci:

“... Iya tidak ada yang atur pastinya, para kitaji yang baku juga tahu.” (SR, 10 Maret 2026)

Di sela-sela zona aktif, pemulung membangun gubuk sederhana dari seng bekas sebagai tempat istirahat, berkumpul, dan menyimpan hasil pilahan. Gubuk-gubuk ini dibangun secara patungan:

“Itu rumah-rumahyya nak kalau mau dibikin itu dibayarki 100.000, jadi ku konsi-konsimi kodong...” (SR, 10 Maret 2026)

Satu gubuk dapat menampung hingga tujuh orang, menunjukkan kepadatan hunian dan intensitas interaksi sosial: “Karena saya 1 rumah-rumah itu 7 orangka.” (SR, 10 Maret 2026).

Gubuk bersifat inklusif terbuka bagi pemulung baru atau yang tidak memiliki kelompok:

“Kalau ada yang tidak ada kelompoknya dibilang ‘disini mki, masih bisaji’ kayak itu temanku awalnya tidak ada rumah-rumahnya jadi kubilang ‘disinimki’, jadi 7 orangma, tadinya itu 2 orangja, itu teman-temanku yang 5 orang tidak ada rumah-rumahnya jadi bilang ‘di sini mki, sama-samaki semua di sini’, ...” (SR, 10 Maret 2026)



Gambar 3. Gubuk Pemulung (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Gubuk juga dapat dipindahkan mengikuti perpindahan zona pembongkaran:

“Kalau pindah itu titik pembongkaran, diangkat tongi juga itu rumah-rumahyya.” (SR, 10 Maret 2026)

Selain sebagai tempat istirahat, gubuk berfungsi menyimpan hasil sortiran dan pusat interaksi sosial antar pemulung. Solidaritas antar pemulung tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan fisik hingga berbagai makanan. Seorang pemulung menjelaskan:

“Berbaurji, tidak anuji, sama semua jki...baku bantujki, kalau ada yang kesulitan, kita seng yang bantu anuna toh barang-barangnya.” (AS, 1 Maret 2026)

Observasi lapangan mencatat pemulung saling membantu, misalnya ketika mengangkat karung berisi material hasil pilahan menuju area gubuk. (Catatan lapangan, 15 Maret 2026).

Berbagi makanan menjadi praktik rutin, terutama di gubuk:

“Baku samajki...bawaka nasi, panggil semua, samamki duduk, bercanda, cerita-cerita, makan-makan.” (MW, 9 Maret 2026).

Seorang pemulung lainnya menambahkan:

“Malah saya nak ... biasa bawaki makanan itu makanki sama-sama biasa disitu rumah-rumahyya.” (SR, 10 Maret 2026).

Solidaritas dalam berbagi informasi juga hadir: pemulung saling memanggil ketika menemukan lokasi dengan banyak barang. MW menuturkan:

“Eh misalnya kalau ada barangnya baru 2 orangja dibelakang, dipanggilki 'woi siniko banyak barangnya'.” (MW, 9 Maret 2026).

Relasi lintas peran dengan sopir truk juga bersifat kooperatif. Pemulung menitipkan hasil pilahan melalui truk yang hendak pulang: “Iye dititipki kayak kalau ada mobil begini mau

pulang bilangka 'naik ka', jadi nah kasih naik juga barang-barangku.” (SR, 10 Maret 2026). Interaksi seringkali hanya berupa isyarat tanpa kata, menunjukkan pemahaman bersama yang terbentuk secara alami (Catatan lapangan, 14 Februari 2026).

3.1.3 Pengetahuan, Strategi, dan Kerentanan Ekonomi Pemulung

Pemulung di TPA Tamangapa memiliki pengetahuan yang rinci tentang jenis, nilai, dan rantai pasok material daur ulang. Seorang pemulung menjelaskan perbedaan kualitas plastik:

“HD itu semacam barang yang bahannya plastik yang agak keras kayak kursi, baskom-baskom, itu yang dibilang HD...” (AS, 1 Maret 2026)

Pengetahuan ini tidak berhenti pada identifikasi jenis, tetapi juga mencakup rantai pasok hingga ke luar pulau. Seorang pengepul yang juga mantan pemulung memaparkan:

“Kalau dos tidak ada jadinya di sini, di Surabaya. Disini na tampungji terus, terus na press ki,...Kalau logam di sini ke Surabaya juga.” (BA, 17 Maret 2026)

Pemulung juga memahami nilai tersembunyi dari barang elektronik bekas. BA menjelaskan kandungan emas dalam limbah elektronik:

“Itu HP ada yang mengandung emas, nah itu kalau peleburan terpisah sendiri itu mulai dari perak, timah, besi, emas....” (BA, 17 Maret 2026)

Barang dengan nilai tertinggi adalah tembaga, meskipun sangat jarang didapatkan:

“Kalau untuk pemulung yang paling mahal kayak tembaga sih, sampai sekarang, tambah mahal lagi sekarang iya, tapi jarang di dapat.” (AI, 17 Maret 2026)

Menghadapi harga yang fluktuatif dan kebutuhan hidup yang mendesak, pemulung mengembangkan strategi ekonomi yang berlapis. Ada yang memilih menjual setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rutin, terutama barang namun bernilai rendah:

“Iyee, plastikji saja ku jual hari-hari. Iya sama karton, sama semuami itu nak, kaleng, botol, kan sedikitji di dapat toh, seperti ituji” (SR, 10 Maret 2026)

Penjualan harian ini seringkali didasarkan pada target kebutuhan tertentu, bukan keuntungan maksimal:

“Biasa yang kujual itu saya plastik, kertas itu kan mauka bayar lampu sama air, jadi kusimpanki, kalau cukupmi kayak 60.000 baru dijual,...” (SR, 10 Maret 2026)

Sebaliknya, untuk barang yang lebih berharga seperti aluminium dan besi, pemulung cenderung menyimpannya terlebih dahulu:

“Ada disimpan, ada langsung dijual...Yang biasa disimpan itu Alma, besi-besi, itu yang disimpan. Di atas ji disimpan karena jauh rumah” (IW, 11 Maret 2026)

Lama penyimpanan bisa mencapai satu bulan, tergantung pada kebutuhan mendesak. Untuk mengamankan barang yang disimpan, pemulung memiliki tempat penyimpanan bersama di atas TPA:

“Disimpan dulu diatas....Iya adaji tempat simpan bersama diatas.” (AS, 1 Maret 2026)

Namun, risiko pencurian mendorong sebagian pemulung untuk tidak menyimpan hasil pilahan setiap hari:

“Jadi tidak ada yang disimpan pokoknya dijualki, itu kertas biar sedikitki kubawaji pulang” (SR, 10 Maret 2026)

Hubungan ekonomi antara pemulung dan pengepul diikat oleh sistem kredit informal. Ketika kebutuhan mendesak sementara hasil pilahan belum terjual, pemulung dapat meminjam uang terlebih dahulu dari pengepul (sistem panjar):

“Iya. Kalau tidak ada, nah mauki belanja, biasa dipanjar dulu sama pengepul ka. Iya biasa ambil dulu. Dikasih lima puluh nanti dipotong.” (MW, 9 Maret 2026)

“Biasa ada memang yang ambil duluan uang ... itu berarti hutang dulu, panjar istilahnya, untuk mau beli sepatu kah, atau apa, jadi pergi cari panjar dulu.” (IW, 11 Maret 2026)

Namun, sistem pembayaran yang paling mengikat adalah sistem nota, di mana pembayaran tidak dilakukan tunai saat barang disetor, melainkan diberikan nota yang baru cair dua hingga tiga hari kemudian:

“Pasti kalau nota itu kayak 2 atau 3 haripi baru didapat uangnya. Iyaa siksaki, manami anak-anak kalau jajannya kalau sekolah,” (MW, 9 Maret 2026)

Keterlambatan ini terjadi ketika gudang pengepul besar tutup atau modal pengepul terbatas:

“Tidakji, kecuali dibilang kalau tutupmi gudang besar, pasti gudang kecil juga disini pasti sistem nota, karena pasti adapi pelemparan baru dibayarki juga.” (MW, 9 Maret 2026)

Keterlambatan pembayaran dari sistem nota, ditambah ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi harga, mendorong banyak pemulung untuk tidak hanya mengandalkan memulung sebagai satu-satunya sumber nafkah. AS menceritakan suaminya yang berpindah-pindah pekerjaan:

“Dia dulu mengojek, kalau kurangi nadapat pergi seng mulung 2 hari 3 hari begitu,... baru ngojek, pergi lagi jadi security baru tidak lama dipecatki, barumi seng pergi mulung, tapi ini tidak pigi seng karena pergi di sawah” (AS, 1 Maret 2026)

AI, pemulung yang lebih muda, memiliki pengalaman bekerja di sektor konstruksi dan perdagangan:

“Karena sayakan dulu biasa 1 hari pergi yaa 3 hari 4 hari tidak lagi, iya karena saya ambil pekerjaan lain kayak jadi driver bangunan” (AI, 17 Maret 2026)

Ia juga pernah menjual pakaian bekas yang didapatkan dari memulung, kemudian menjual kembali di kampung halamannya:

“Dulu saya itu, kalau macam ada itu baju-baju bekas toh saya kumpul, ... saya bawa ke kampung saya jual, dulu saya bisnis begitu, ...” (AI, 17 Maret 2026)

3.1.4 Ringkasan Temuan

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian

Dimensi	Deskripsi Singkat Temuan Empiris
Otonomi waktu dan lokasi kerja	Pemulung bebas menentukan zona kerja (Bintang Lima/Tangkasa) dan jam kerja tanpa intervensi formal; shift bergiliran secara sukarela; preferensi lokasi didasarkan pada pertimbangan kenyamanan dan rasa aman.
Gubuk sebagai ruang kolektif	Gubuk dibangun secara patungan (Rp100.000 per gubuk), bersifat inklusif bagi pemulung baru, dapat dipindahkan mengikuti perpindahan zona pembongkaran, menampung hingga tujuh orang, serta berfungsi sebagai tempat istirahat, penyimpanan hasil sortiran, dan pusat interaksi sosial.
Solidaritas kerja	Solidaritas diwujudkan melalui bantuan fisik (mengangkat karung), berbagi makanan dan minuman di gubuk, berbagi informasi mengenai lokasi material bernilai, serta relasi kooperatif dengan sopir truk melalui praktik penitipan barang dan komunikasi nonverbal.
Pengetahuan material dan rantai nilai	Pemulung mampu membedakan jenis material seperti plastik HD, memahami rantai pasok material hingga Surabaya, serta mengetahui nilai ekonomi berbagai material, termasuk tembaga sebagai material bernilai tinggi dan emas yang terkandung dalam limbah elektronik.
Strategi jual-simpan	Material bernilai rendah seperti plastik dan karton dijual setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rutin, sedangkan material bernilai tinggi seperti aluminium dan besi disimpan hingga harga dianggap menguntungkan. Risiko pencurian menyebabkan sebagian pemulung memilih tidak menyimpan hasil pilahan.
Sistem panjar dan nota	Panjar memungkinkan pemulung meminjam uang sebelum menjual hasil pilahan sehingga membantu memenuhi kebutuhan mendesak. Sebaliknya, sistem nota menyebabkan pembayaran tertunda 2–3 hari sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan harian. Sistem ini muncul ketika gudang besar tutup atau modal pengepul terbatas.
Diversifikasi nafkah	Pemulung mengembangkan pekerjaan sampingan sebagai strategi bertahan hidup, seperti menjadi pengemudi ojek, satpam, buruh sawah, driver bangunan, penjual pakaian bekas, dan kernet truk.

3.2 Diskusi

Studi ini mengungkap bagaimana praktik kerja pemulung di TPA Tamangapa terorganisasi secara kolektif dan adaptif dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan. Pemulung memiliki otonomi penuh atas waktu dan lokasi kerja, didukung solidaritas yang terwujud dalam bantuan fisik, berbagi sumber daya, serta pemanfaatan gubuk sebagai ruang koordinasi bersama, pemulung mengandalkan pengetahuan rinci tentang jenis dan nilai material untuk menyusun strategi jual-simpan, sekaligus terikat dalam sistem utang (panjar dan nota) yang melindungi namun juga membelenggu, dengan diversifikasi nafkah sebagai strategi bertahan.

3.2.1 Otonomi dan Solidaritas Sebagai Praktik Keseharian yang Memproduksi Ruang Kerja Kolekti

Pemulung di TPA Tamangapa menjalani pekerjaan secara otonom. Mereka menentukan sendiri jam kerja, kebebasan berpindah antarzona, serta menjalani shift informal 24 jam tanpa intervensi pihak eksternal. Dalam kerangka Lefebvre (1991), aktivitas tersebut adalah *spatial practice*, yaitu ruang diproduksi setiap hari melalui rutinitas, pergerakan, dan interaksi material. Praktik otonom yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemulung memungkinkan mereka bertahan dalam kerentanan.

Otonomi berbasis pada fondasi kolektif juga ditemukan oleh Rosaldo (2024) dalam studinya mengenai pemulung jalanan di Sao Paulo yang menolak formalisasi melalui koperasi karena dianggap mengganggu kebebasan menentukan rute dan jam kerja. Namun, studi Rosaldo hanya berfokus pada pemulung jalanan dan tidak memotret pemulung yang bekerja di TPA, sehingga ia tidak menangkap dinamisasi otonomi dipengaruhi oleh materialitas ruang, misalnya perbedaan risiko fisik antar zona mekanis dan manual. Sementara itu, Kasinja dan Tilley (2018) dalam studinya tentang integrasi pemulung ke dalam sistem koperasi di Malawi melaporkan bahwa ketakutan kehilangan independensi (otonomi kerja) menjadi alasan utama penolakan formalisasi. Temuan ini menegaskan bahwa pemulung menjadikan otonomi sebagai basis kerja, namun Kasinja dan Tilley mengasumsikan bahwa preferensi responden stabil dan tidak tergantung konteks. Asumsi demikian terbatas di TPA Tamangapa karena realitasnya menunjukkan bahwa pilihan zona kerja dapat berubah berdasarkan evaluasi risiko. Oleh karenanya,

otonomi bukan hanya bebas dari aturan formal, tetapi juga mencakup kemampuan membaca risiko. Preferensi ini memperlihatkan bahwa *spatial practice* pemulung Tamangapa tidak seperti yang diandaikan Rosaldo maupun Kasinja dan Tilley: bukan hanya penolakan terhadap struktur formal, tetapi juga produksi ruang yang responsif terhadap ancaman fisik.

Otonomi tersebut ditunjang oleh solidaritas yang hidup dalam ikatan relasional. Solidaritas tersebut hadir melalui praktik membangun gubuk secara patungan, berfungsi sebagai tempat istirahat, menyimpan hasil sortiran, dan menjadi arena berinteraksi. Dalam perspektif Lefebvre (1991), gubuk dapat dibaca sebagai manifestasi dari *representational space*, yaitu ruang yang dihayati oleh penghuninya melalui interaksi sosial, simbol, dan makna emosional. Gubuk adalah ruang yang diproduksi sekaligus dihayati sebagai tempat bermakna untuk berbagi makanan, menyimpan hasil, dan membangun rasa memiliki bersama.

Fenomena serupa dijelaskan Bayat (2009) sebagai *quiet encroachment*: perambahan diam-diam oleh kelompok marginal atas ruang perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa pengakuan legal. Bayat mendokumentasikan bagaimana penghuni liar di Kairo dan Teheran mengklaim tanah secara permanen. Namun, ia tidak secara spesifik membahas pemulung TPA, apalagi gubuk yang bersifat mobile dan sementara. Di TPA Tamangapa, gubuk tidak hanya diklaim tetapi juga dipindahkan ketika zona pembongkaran bergeser. Karakter mobile ini menunjukkan bahwa *representational space* di Tamangapa mengambil bentuk yang lebih fleksibel daripada yang digambarkan Bayat. Di sini, produksi ruang bukanlah klaim permanen, melainkan praktik adaptif yang mengikuti pergerakan zona kerja.

Selanjutnya, praktik solidaritas hadir dalam bentuk lain, yakni melalui praktik saling membantu mengangkat karung, dan berbagi informasi tentang lokasi material bernilai. Praktik ini tidak hanya bersifat fisik dan temporal, tetapi juga ekonomis. Polanyi (2001) menyebutnya sebagai *embedded economy*, yakni praktik ekonomi yang tertanam dalam relasi sosial. Keputusan pemulung untuk menitipkan barang hasil memulung kepada sopir truk didasarkan pada kepercayaan, bukan kontrak formal. Jaringan sosial yang berbasis pada kepercayaan tersebut juga dipotret oleh Zapata Campos et al. (2023) dan mengembangkannya melalui konsep *economies of affection* dalam menjelaskan bagaimana pemulung di Argentina, Brasil, Nikaragua, Kenya, dan Tanzania mengandalkan jaringan sosial berbasis kerabat dan kepercayaan dalam kondisi kelangkaan ekstrem. Namun, sesuatu yang terabaikan adalah Campos memotret solidaritas tersebut dalam konteks organisasi pemulung yang relatif mapan dengan dukungan LSM atau pemerintah, sedangkan di TPA Tamangapa, tidak ada organisasi formal pemulung, sehingga solidaritas hadir dalam bentuk yang lebih longgar dan situasional. Realitas tersebut justru menunjukkan bahwa *embeddedness economy* tidak memerlukan struktur formal untuk berfungsi; ia hidup secara alami dan menjadi solidaritas kolektif pemulug TPA Tamangapa.

Kain et al. (2022) juga menegaskan bahwa solidaritas kolektif merupakan strategi efektif pemulung di Amerika Latin dan Afrika Timur. Namun, studi komparasi mereka berfokus pada organisasi pemulung dan tidak mendalam terhadap bagaimana *embeddedness* dipraktikkan secara harian, misalnya melalui interaksi nonverbal di gubuk dan berbagi makanan. Sebaliknya, Kasinja dan Tilley (2018) di Malawi menemukan bahwa *free riding* (mengambil keuntungan dari kerja kolektif tanpa ikut berkontribusi) menjadi penghalang solidaritas dalam koperasi. Di TPA Tamangapa, solidaritas yang mengakar serta pengawasan informal yang hidup di gubuk justru meminimalisir perilaku tersebut. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor spasial, di mana pemulung di Tamangapa bekerja di lokasi TPA yang sama setiap hari, sehingga interaksi lebih intensif dan akuntabilitas sosial lebih tinggi. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa *embeddedness* diperkuat oleh kedekatan fisik dan rutinitas bersama, sebuah temuan yang tidak terlihat dalam studi Kasinja dan Tilley yang berlokasi di permukiman tidak terencana.

Realitas di TPA Tamangapa memperlihatkan bagaimana ruang diproduksi melalui praktik harian yang sekaligus tertanam dalam nilai dan resiprositas. Otonomi memungkinkan pemulung memproduksi gubuk yang mobile dan adaptif sebagai wujud *spatial practice*. Gubuk menjadi basis fisik bagi solidaritas untuk berkembang. Solidaritas memperkuat otonomi dengan menyediakan jaring pengaman sosial, sehingga pemulung tidak perlu tunduk pada aturan formal atau pihak luar. Praktik kerja pemulung di TPA Tamangapa terorganisasi secara kolektif melalui otonomi yang dilandasi penilaian risiko antar zona,

produksi ruang sementara sebagai *representational space* yang fleksibel, dan solidaritas yang menunjukkan *embeddedness* dalam kehidupan sehari-hari.

3.2.2 Pengetahuan Lokal dan Rantai Nilai Sebagai Modal Bertahan yang Rentan

Pemulung di TPA Tamangapa memiliki pengetahuan rinci tentang jenis, nilai, dan rantai pasok material daur ulang. Mereka mampu membedakan plastik HD dari jenis lain, mengetahui bahwa tembaga memiliki nilai tertinggi, dan memahami bahwa material seperti aluminium dan besi harus dipisahkan berdasarkan ketebalan. Pengetahuan ini bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi modal simbolik yang diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun dan ditularkan secara informal antarpemulung. Dengan kata lain, pengetahuan material menjadi fondasi yang mendasari keputusan ekonomi pemulung.

Dalam kerangka ekonomi moral Thompson (1971), pengetahuan semacam itu menjadi dasar bagi kaum miskin kota untuk menegosiasikan hak subsistensi mereka di hadapan pasar yang fluktuatif. Studi Gall et al. (2020) di Nairobi membuktikan bahwa pemilahan awal oleh pemulung menghasilkan kualitas plastik daur ulang setara dengan sistem formal di negara maju. Temuan di TPA Tamangapa mengonfirmasi pentingnya pengetahuan teknis tersebut. Namun, studi Gall et al. berfokus pada efisiensi teknis daur ulang, mengabaikan analisis mengenai bagaimana proses pengetahuan tersebut direproduksi dalam komunitas yang terstigma dan tanpa dukungan negara. Kesenjangan ini penting karena pemulung di Tamangapa aksesnya terbatas terhadap pelatihan formal, pengetahuan mereka hadir melalui praktik harian dan ditularkan antar sesama pemulung.

Sementara itu, Trisyanti et al. (2022) di Jabodetabek menemukan bahwa pemulung menyumbang 65% dari total PET yang terkoleksi. Harga yang mereka terima 40-50% lebih rendah karena menjual dalam keadaan campuran. Pemulung TPA Tamangapa berada dalam situasi yang lebih rentan: fluktuasi harga musiman yang tajam (potongan 10%) dan ketergantungan informasi pada pengepul, karena pemulung tidak mengetahui rantai pasok di hilir. Akibatnya, fluktuasi harga tidak dapat dikendalikan pemulung; mereka hanya bisa menerima harga yang ditentukan pembeli dari gudang besar. Dengan demikian, pengetahuan material merupakan modal bertahan yang diakui secara teknis, tetapi nilainya tidak dapat direalisasikan secara penuh akibat posisi tawar lemah dan ketiadaan akses ke pasar yang adil. Pengetahuan tidak serta-merta membebaskan pemulung dari ketidakpastian; ia justru menjadi alat untuk bertahan dalam ketidakpastian.

Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong pemulung untuk mengembangkan strategi jual-simpan sebagai respons terhadap fluktuasi harga. Strategi ini membedakan perlakuan antara barang bernilai rendah dan bernilai tinggi. Barang bernilai rendah seperti plastik dan karton dijual setiap hari untuk memenuhi kebutuhan harian. Penjualan harian ini memprioritaskan kebutuhan segera, bukan keuntungan maksimal. Sebaliknya, barang bernilai tinggi seperti aluminium dan besi disimpan di tempat bersama selama berminggu-minggu hingga harga dirasa cukup. Strategi ini mencerminkan rasionalitas ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi pada keamanan subsistensi.

Rasionalitas semacam itu sejalan dengan temuan Scott (1976) tentang strategi menghindari risiko petani miskin. Dalam kerangka Scott, petani cenderung memprioritaskan ketahanan pangan daripada keuntungan maksimal karena risiko kelaparan terlalu besar. Meminjam kerangka ini untuk menganalisis pemulung perkotaan memang memerlukan perluasan konsep, tetapi logika yang sama tetap relevan: mengamankan kebutuhan harian terlebih dahulu (melalui jual cepat barang rendah), baru menyimpan kelebihan untuk masa depan (melalui simpan barang tinggi). Namun, strategi simpan memiliki risiko serius, yakni pencurian barang. Tempat penyimpanan bersama bersifat terbuka dan pengawasan informal tidak selalu efektif. Dengan demikian, strategi jual-simpan di Tamangapa bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi juga respons terhadap ketidakamanan ruang. Keterbatasan ini kemudian membawa pemulung pada mekanisme kredit informal sebagai solusi atas kebutuhan mendesak.

Pemulung meminjam uang dari pengepul (panjar) yang kelak dipotong dari hasil penjualan. Namun, pembayaran sering tidak tunai; nota baru cair dua hingga tiga hari kemudian, menyulitkan mereka yang membutuhkan uang segera. Thompson (1971) menjelaskan bahwa dalam masyarakat pra-kapitalis, pertukaran ekonomi tidak hanya mengikuti logika pasar, tetapi juga norma timbal balik dan perlindungan terhadap hak subsistensi kaum miskin. Dalam kerangka ini, panjar dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan: pengepul memberikan uang muka untuk menutupi kebutuhan mendesak pemulung, dan pemulung membayar dengan hasil kerja mereka. Namun, sistem nota justru mengingkari perlindungan tersebut karena menunda pembayaran. Keterlambatan ini terjadi ketika gudang besar tutup atau modal pengepul terbatas, menunjukkan bahwa kerentanan pemulung tidak hanya berasal dari pasar, tetapi juga dari likuiditas para pembeli di atas mereka.

Fenomena serupa ditemukan Gill (2007) pada pemulung di Delhi, di mana utang melindungi dari kelaparan tetapi sekaligus membelenggu karena tidak ada akses ke institusi keuangan formal. Di Tamangapa, sistem panjar dan nota adalah *embeddedness* Polanyi (2001) yang bersifat pedang bermata dua. Sejalan dengan kritik Burawoy (2010) terhadap optimisme Polanyi bahwa masyarakat akan secara spontan melindungi diri dari pasar, sistem panjar di Tamangapa adalah bukti bahwa *embeddedness* tidak selalu melindungi, tetapi juga dapat membelenggu. Kondisi serupa ditemukan Berrou and Gondard-Delcroix (2018) di Burkina Faso, di mana *over-embeddedness* (jaringan sosial yang terlalu padat dan statis) menjadi jebakan yang menghambat mobilitas ekonomi wirausaha informal. Di Tamangapa, ketiadaan akses identitas legal memperkuat jebakan *over-embeddedness* tersebut, karena pemulung tidak memiliki alternatif sumber kredit selain pengepul. Rantai nilai di TPA Tamangapa diikat oleh utang dan kepercayaan, bukan kontrak.

Ketika utang terus berulang dan pembayaran tertunda, pendapatan dari memulung menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan; keadaan inilah yang mendorong pemulung untuk mencari sumber nafkah lain di luar memulung. Suami seorang pemulung perempuan bekerja sebagai ojek, satpam, atau buruh sawah; sementara itu, pemulung lain, AI, memiliki pengalaman sebagai sopir bangunan, menjual baju bekas, dan kini menjadi karnet truk sampah. Dalam kerangka Ellis (1998), rumah tangga miskin di negara berkembang mengombinasikan berbagai sumber pendapatan untuk mengurangi risiko dan memperkuat resiliensi. Di Tamangapa, diversifikasi menjadi jalan keluar ketika memulung saja tidak cukup.

Studi Angriani et al. (2024) di TPA Tamangapa mengonfirmasi bahwa pemulung melakukan kerja sampingan sebagai tukang parkir, buruh bangunan, atau guru ngaji. Namun, studi tersebut memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang membatasi kontribusinya terhadap pemahaman diversifikasi nafkah pemulung. Pertama, analisis mereka berhenti pada level deskripsi tanpa menjelaskan mekanisme kausal yang mendorong diversifikasi. Kedua, studi mereka mengabaikan sistem panjar dan nota yang menjadi pengikat utama hubungan ekonomi pemulung-pengepul di TPA yang sama, hal ini merupakan kelalaian serius karena utang adalah inti dari strategi bertahan pemulung. Ketiga, kerangka modal sosial yang mereka gunakan (Putnam, Hasbullah) cenderung optimis dan mengabaikan sisi gelap modal sosial sebagai alat kontrol dan eksploitasi, sebagaimana dikritisi oleh literatur tentang *over-embeddedness* (Berrou and Gondard-Delcroix, 2018). Dengan demikian, meskipun Angriani et al. (2024) memberikan konfirmasi empiris tentang adanya diversifikasi, studi ini justru memperkuat perlunya analisis yang lebih mendalam tentang akar struktural kerentanan ekonomi pemulung.

Di TPA Tamangapa, diversifikasi bukanlah tanda kemajuan ekonomi, melainkan indikator bahwa pendapatan dari memulung tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten. Ketimpangan akses terhadap kerja sampingan ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak tersedia bagi semua pemulung. Mereka yang memiliki jaringan sosial lebih luas atau keterampilan tambahan lebih mampu bertahan, sementara yang lain terjebak dalam ketergantungan pada memulung. Dengan demikian, diversifikasi nafkah adalah strategi bertahan yang efektif tetapi tidak merata, dan ia menjadi penutup dari rangkaian praktik ekonomi pemulung yang dimulai dari pengetahuan material, dilanjutkan dengan strategi jual-simpan, diperantarai sistem utang, dan berakhir pada pencarian kerja di luar sektor sampah.

Pengetahuan material menjadi modal yang tidak dapat direalisasikan tanpa akses ke pasar yang adil. Strategi jual-simpan adalah respons terhadap fluktuasi harga, tetapi terhambat oleh risiko pencurian. Sistem panjar dan nota melindungi dari kelaparan sekaligus membelenggu dalam ketergantungan. Diversifikasi nafkah menjadi jaring pengaman, tetapi tidak merata. Praktik ekonomi pemulung di TPA Tamangapa tidak semata-mata rasionalitas pasar, tetapi juga ekonomi moral yang tertanam dalam relasi sosial, utang, dan keterbatasan struktural. Pemulung bukan sekadar korban pasar, tetapi aktor yang secara aktif mengelola pengetahuan, menyusun strategi, dan memanfaatkan

utang untuk bertahan. Namun, semua strategi tersebut beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh ketiadaan akses dan tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada kepentingan pemulung.

3.2.3 Implikasi Teoretis

Temuan dari TPA Tamangapa memberikan beberapa catatan terhadap diskusi teoretis mengenai praktik kerja informal di sektor daur ulang. Pertama, temuan tentang otonomi pemulung dalam menentukan zona dan jam kerja mengilustrasikan apa yang dimaksud Lefebvre (1991) sebagai *spatial practice*: ruang diproduksi setiap hari melalui rutinitas, pergerakan, dan interaksi material. Kemampuan pemulung membaca risiko fisik (perbedaan zona

mekanis dan manual) dan menyesuaikan pilihan kerja menunjukkan bahwa produksi ruang oleh pekerja informal tidak semata-mata bebas dari struktur, tetapi juga responsif terhadap kondisi material TPA.

Kedua, temuan tentang gubuk yang dibangun patungan, bersifat inklusif, dan dapat dipindahkan mengikuti zona pembongkaran sejalan dengan konsep *representational space* (Lefebvre, 1991) sebagai ruang yang dihayati oleh penghuninya melalui interaksi sosial, simbol, dan makna emosional. Berbeda dengan studi Bayat (2009) tentang *quiet encroachment* di Timur Tengah yang menggambarkan klaim permanen atas ruang, gubuk di TPA Tamangapa menunjukkan bahwa *representational space* dapat mengambil bentuk yang lebih fleksibel dan adaptif, bukan klaim permanen, melainkan praktik mobilitas yang mengikuti pergerakan zona kerja.

Ketiga, praktik solidaritas tanpa struktur formal di TPA Tamangapa menunjukkan bahwa *embeddedness economy* Polanyi (2001) tidak memerlukan koperasi atau serikat untuk berfungsi. Temuan ini konsisten dengan studi Campos et al. (2023) tentang *economies of affection*, sekaligus memperkaya pemahaman tentang bagaimana solidaritas dapat berlangsung secara longgar dan situasional dalam kondisi kelangkaan, tanpa hierarki formal.

Keempat, sistem panjar dan nota di TPA Tamangapa mengilustrasikan ambiguitas *embeddedness* dalam ekonomi informal. Di satu sisi, panjar melindungi pemulung dari kelaparan ketika pendapatan tidak mencukupi. Di sisi lain, nota yang menunda pembayaran menciptakan ketergantungan pada pengepul. Temuan ini sejalan dengan kritik Burawoy (2010) bahwa *embeddedness* tidak selalu melindungi pekerja informal, serta konsisten dengan studi Berrou dan Gondard-Delcroix (2018) tentang *over-embeddedness* yang dapat menghambat mobilitas ekonomi. Studi ini memberikan ilustrasi spesifik tentang mekanisme panjar dan nota sebagai bentuk *embeddedness* yang bersifat pedang bermata dua dalam konteks TPA.

Kelima, diversifikasi nafkah di TPA Tamangapa menunjukkan bahwa strategi ini lebih bersifat defensif daripada proaktif. Dalam kerangka Ellis (1998), diversifikasi dapat menjadi strategi akumulasi atau bertahan. Di TPA Tamangapa, diversifikasi hadir karena pendapatan dari memulung tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa diversifikasi tidak serta-merta menandakan resiliensi, tetapi juga dapat menjadi indikator kerentanan struktural.

Studi ini berjumpa pada satu benang merah: praktik kerja pemulung di TPA dapat dipahami melalui lensa *spatial practice*, *representational space*, *embeddedness*, dan ekonomi moral. Studi ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana otonomi, solidaritas, dan strategi ekonomi saling terkait dalam pekerjaan informal: otonomi tanpa solidaritas adalah kerentanan, sementara solidaritas tanpa otonomi dapat menjadi belenggu.

3.2.4 Implikasi Praktis

Studi ini menawarkan tiga rekomendasi praktis dalam merespons praktik kerja informal pemulung di sektor daur ulang TPA Tamangapa yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini adalah UPTD TPA Tamangapa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Pertama, pendataan dan pengakuan administratif terhadap pemulung. UPTD TPA dapat melakukan pendataan sederhana (nama, usia, zona kerja) tanpa konsekuensi administratif yang mengikat, seperti kewajiban perpajakan atau kontrak kerja. Langkah ini penting untuk mengurangi stigma dan memberikan dasar bagi intervensi non-represif di masa depan, tanpa memicu resistensi karena pemulung cenderung menolak formalisasi yang mengganggu otonomi (Rosaldo, 2024).

Kedua, fasilitasi forum komunikasi rutin. Dinas Lingkungan Hidup dapat memfasilitasi pertemuan berkala antara perwakilan pemulung, pengepul, dan UPTD. Pada tahap awal, forum sebaiknya difasilitasi oleh pihak netral (misalnya akademisi atau pendamping komunitas) agar pemulung tidak merasa terintimidasi dalam menyampaikan keluhan terkait harga, keamanan penyimpanan, dan kondisi kerja. Forum ini tidak bertujuan mengatur harga secara *top-down*, tetapi menciptakan ruang negosiasi yang selama ini tidak tersedia.

Ketiga, pelatihan teknis sukarela. Dinas Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan UPTD TPA sebagai fasilitator lapangan untuk menyelenggarakan pelatihan teknis yang bersifat sukarela. Pelatihan mencakup dua jenis: (a) peningkatan keterampilan pemilahan dan pengolahan sampah untuk menambah nilai jual material, dan (b) keterampilan teknis lain (misalnya perawatan alat, kerajinan daur ulang) sebagai kompetensi tambahan. Pelatihan

tidak dimaksudkan untuk memaksa pemulung beralih profesi, melainkan untuk memperluas pilihan ekonomi mereka tanpa mengganggu otonomi kerja yang sudah ada.

4. Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa praktik kerja pemulung di TPA Tamangapa terorganisasi secara kolektif dan adaptif. Otonomi penuh atas waktu dan lokasi kerja, didukung solidaritas informal serta pemanfaatan gubuk sebagai ruang koordinasi bersama, menjadi fondasi bagi produksi ruang kerja kolektif. Di sisi lain, pengetahuan material yang rinci tidak dapat direalisasikan secara penuh karena posisi tawar lemah dan ketergantungan pada pengepul melalui sistem panjar dan nota. Diversifikasi nafkah yang dilakukan pemulung bersifat defensif, mencerminkan ketidakcukupan pendapatan dari memulung, bukan strategi resiliensi proaktif. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperkaya diskusi teoretis tentang spatial practice, representational space (Lefebvre), embeddedness (Polanyi), dan ekonomi moral (Thompson) dalam konteks pekerja informal di TPA Global South, serta mengonfirmasi kritik Burawoy bahwa embeddedness tidak selalu melindungi tetapi juga dapat membelenggu. Studi ini memiliki keterbatasan, yakni hanya mencakup satu TPA dengan periode pengamatan yang relatif singkat, serta tidak menganalisis dimensi gender dan partisipasi anak dalam pekerjaan memulung. Oleh karena itu, studi lanjutan diharapkan dapat melakukan studi komparatif antar TPA di Indonesia, menganalisis dampak kebijakan formalisasi terhadap otonomi dan solidaritas pemulung, serta mengeksplorasi mekanisme alternatif penguatan posisi tawar tanpa memaksakan struktur organisasi formal.

Referensi

1. Akponah, P.O., 2018. The Social Life of Rubbish: An Ethnography in Lagos, Nigeria (thesis). University of Leicester.
2. Amin, C., Umrotun, Fikriyah, V.N., Samson, M.G.M., 2026. Livelihood vulnerability of urban waste pickers in Indonesia: Insights for inclusive circular economy transitions. *World Dev. Sustain.* 8, 100268. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2026.100268>
3. Angriani, B.N., Abdullah, S., Muhammad, R., 2024. Living Strategy of Waste Picker Community in Makassar City. *Rev. Gest. Soc. E Ambient.* - RGSA 18, e05210–e05210. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-028>
4. Angriani, B.N., Abdullah, S., Muhammad, R., 2023. Modal Sosial dan Nafkah Berkelanjutan Komunitas Pemulung: Studi Kasus Kota Makassar. *J. Humanity Soc. Justice* 124–139. <https://doi.org/10.38026/jhsj.v5i2.25>
5. Bayat, A., 2009. *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford University Press, Stanford, Calif.
6. Berrou, J.-P., Gondard-Delcroix, C., 2018. Dynamics of social networks of urban informal entrepreneurs in an African economy. *Rev. Soc. Econ.* 76, 167–197. <https://doi.org/10.1080/00346764.2017.1349330>
7. Burawoy, M., 2010. From Polanyi to Pollyanna: The False Optimism of Global Labor Studies. *Glob. Labour J.* 1. <https://doi.org/10.15173/glj.v1i2.1079>
8. Campos, M.J.Z., Zapata, P., Pe rez Reynosa, J., 2023. (Re)gaining the urban commons: everyday, collective, and identity resistance. *Urban Geogr.* 44, 1259–1284. <https://doi.org/10.1080/02723638.2022.2090117>
9. Colombijn, F., 2020. Secrecy at the End of the Recycling Chain: The Recycling of Plastic Waste in Surabaya, Indonesia. *Worldw. Waste* 3, 2–2. <https://doi.org/10.5334/wwwj.43>
10. Cook, E., Ionkova, K., Bhada-Tata, P., Yadav, S., van Woerden, F., 2026. What a Waste: Global Snapshot of Solid Waste Management toward Circularity until 2050. World Bank.
11. Creswell, J.W., 2023. *Penelitian Kualitatif & Desai Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*, 3rd ed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
12. Dias, S.M., 2016. Waste pickers and cities. *Environ. Urban.* 28, 375–390. <https://doi.org/10.1177/0956247816657302>
13. Ellis, F., 1998. Household strategies and rural livelihood diversification. *J. Dev. Stud.* <https://doi.org/10.1080/00220389808422553>
14. Fort, L., 2026. From Seaweed to Plastic: Gleaning and the moral economy of waste in Indonesia. *Indones. Malay World* 1–26. <https://doi.org/10.1080/13639811.2026.2635872>
15. Gall, M., Wiener, M., Chagas de Oliveira, C., Lang, R.W., Et., A., 2020. Building a circular plastics economy with informal waste pickers: Recyclate quality, business model, and societal impacts. *Resour. Conserv. Recycl.* <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104685>
16. Gill, K., 2007. Interlinked contracts and social power: Patronage and exploitation in India's waste recovery market. *J. Dev. Stud.* <https://doi.org/10.1080/00220380701611519>
17. Kain, J.-H., Zapata, P., Azevedo, A.M.M. de, Carenzo, S., Charles, G., Gutberlet, J., Oloko, M., Reynosa, J.P., Campos, M.J.Z., 2022. Characteristics, challenges and innovations of waste picker organizations: A comparative perspective between Latin American and East African countries. *PLOS ONE* 17, e0265889. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265889>
18. Kasinja, C., Tilley, E., 2018. Formalization of Informal Waste Pickers' Cooperatives in Blantyre, Malawi: A Feasibility Assessment. *Sustainability* <https://doi.org/DOI:10.3390/su10041149>
19. Kvale, S., Brinkmann, S., 2009. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE.
20. Lata, L., 2022. The production of counter-space: Informal labour, social networks and the production of urban space in Dhaka. *Curr. Sociol.* 71 001139212210780. <https://doi.org/10.1177/00113921221078049>
21. Lefebvre, H., 1991. *The production of space*, Reprinted. ed. Blackwell, Oxford. Lincoln, Y.S., Guba, E.G., 1985. *Naturalistic Inquiry*. SAGE.
22. Polanyi, K., 2001. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Press.
23. Rosaldo, M., 2024. Top-Down and Bottom-Up Formalization: Waste Pickers' Struggles for Labor Rights in Saˆo Paulo and Bogota'. *ILR Rev.* 77, 32–61. <https://doi.org/10.1177/00197939231205515>
24. Rusni, N.K., 2024. Permasalahan sampah kota Makassar studi kasus TPA Tamangapa. *Waste Handl. Environ. Monit.* 1. <https://doi.org/10.61511/whem.v1i1.2024.511>
25. Samson, M., 2010. Reclaiming Reusable and Recyclable Materials in Africa. *Women Informal Employ. Glob. Organ. WIEGO*.

26. Sasaki, S., Choi, Y., Watanabe, K., 2022. Economic status of waste pickers in Bantar Gebang compared to other workers in Indonesia. *Habitat Int.* <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102501>
27. Scott, J.H., 1976. A Theory of Optimal Capital Structure. *Bell J. Econ.* 7, <https://doi.org/10.2307/3003189>
28. Stake, R.E., 1995. *The Art of Case Study Research*. SAGE.
29. Thompson, E.P., 1971. THE MORAL ECONOMY OF THE ENGLISH CROWD IN THE
30. EIGHTEENTH CENTURY. *Past Present* 50, 76–136. <https://doi.org/10.1093/past/50.1.76>
31. Trisyanti, D., Wengi, K.R.L., Rachmawati, R.L., Akib, R., 2022. ADVANCING THE POTENTIAL OF PET AND PP-BASED BEVERAGE PACKAGING TO SUPPORT CIRCULAR ECONOMY. *J. Environ. Sci. Sustain. Dev.* 5, 378–403. <https://doi.org/10.7454/jessd.v5i2.1154>
32. Wittmer, J., 2021. “We live and we do this work”: Women waste pickers’ experiences of wellbeing in Ahmedabad, India. *World Dev.* 140, 105253. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105253>
33. Xheneti, M., Madden, A., 2025. Women’s entrepreneurship in the informal economy: A socio-spatial perspective. *Hum. Relat.* 78, 1123–1162. <https://doi.org/10.1177/00187267241288661>